
KEBERAGAMAN SOSIAL-BUDAYA KESULTANAN YOGYAKARTA

Y. Argo Twikromo

FISIP, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: argotwikromo@gmail.com

Abstrak

Artikel ini merangkum analisis pengelolaan keberagaman dari dua cara pandang dengan pijakan relatif berbeda. Pertama, pengelolaan yang didorong dari atas oleh pemerintah kolonial Belanda dan negara Indonesia. Kedua, pengelolaan dari bawah melalui peran dominan garis keturunan lokal para Sultan, kerabat, dan para pendukung Kesultanan Yogyakarta. Ketika hubungan etnis, kelas, dan agama di Indonesia sering dipandang sebagai sumber potensial konflik dan kekerasan, maka keberagaman relatif dapat berujung pada eksploitasi, diskriminasi, marginalisasi, dan konflik. Dalam konteks ini, analisis tentang keberagaman menjadi krusial dalam proses perwujudan keharmonisan kehidupan bersama. Artikel ini memberikan pemahaman sejauh mana perkembangan sosial-budaya di wilayah Yogyakarta telah menggerakkan pengelolaan keberagaman menuju tatanan kemajemukan sosial-budaya yang lebih luas. Yogyakarta relatif dapat mengelola keberagaman dengan menyeimbangkan kelompok-kelompok heterogen dalam fleksibilitas identitas mereka. Yogyakarta merupakan wilayah yang relatif otonom dan memiliki sejarah dengan konflik kekerasan relatif sedikit, sehingga Yogyakarta menjadi contoh kasus yang menarik dalam proses perwujudan keharmonisan kehidupan bersama seiring dengan perkembangan kehidupan.

Kata Kunci: keberagaman; kesultanan; Yogyakarta

SOCIO-CULTURAL DIVERSITY OF THE YOGYAKARTA SULTANATE

Abstract

This article summarizes the analysis of diversity management from two perspectives with relatively different perspectives. First, management driven from above by the Dutch colonial government and the Indonesian state. Second, management from below through the dominant role of local lineages of the Sultans, relatives, and supporters of the Yogyakarta Sultanate. While ethnic, class, and religious relations in Indonesia are often viewed as potential sources of conflict and violence, relative diversity can lead to exploitation, discrimination, marginalization, and conflict. In this context, an analysis of diversity is crucial in the process of realizing harmonious communal life. This article provides an understanding of the extent to which socio-cultural developments in the Yogyakarta region have moved diversity management toward a broader socio-cultural pluralistic order. Yogyakarta is relatively able to manage diversity by balancing heterogeneous groups within the flexibility of their identities. Yogyakarta is a relatively autonomous region and has a history of relatively few violent conflicts, making it an interesting case study in the process of realizing harmonious communal life alongside the development of life.

Keywords: diversity; sultanate; Yogyakarta

I. PENDAHULUAN

Setelah krisis ekonomi Asia 1997, gelombang unjuk rasa melanda kota-kota besar di Indonesia hingga jatuhnya Presiden Suharto pada Mei 1998. Krisis ekonomi Asia 1997 telah memicu gelombang protes rakyat di berbagai kota terhadap upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh presiden, keluarganya, dan kroni-kroninya, termasuk terhadap keberadaan pemerintahan otoriter selama kurang lebih tiga dasawarsa. Kemarahan massa sering kali beralih

pada tindakan amuk massa yang menasar kelompok minoritas etnis dan agama (Emmerson, 1999). Konflik kekerasan melanda beberapa wilayah, seperti Jakarta, Medan, Surakarta (Solo), kemudian meluas ke berbagai kota di Indonesia. Sementara itu, meskipun Kota Solo mengalami kekacauan massal, Kota Yogyakarta sebagai kota tetangga relatif dapat mengelola pergesekan yang terjadi dan cenderung tidak berkembang ke arah kekacauan massal. Ketika sekitar satu juta orang berkumpul di Alun-Alun Utara pada 20 Mei 1998, Sultan Kesultanan Yogyakarta yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menenangkan massa dan terhindar dari kerusuhan massal seperti yang terjadi di kota-kota lain (Friend, 2003). Tanpa harus menonjolkan keberadaan militer dan polisi, Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menyampaikan apa yang ingin didengar pengunjuk rasa, yaitu Suharto telah kehilangan legitimasinya dan Indonesia membutuhkan reformasi. Upaya untuk merajut musyawarah dan mufakat dalam dialog tersebut kembali dilakukan pada Sabtu dini hari, 30 Agustus 2025. Sri Sultan HB X kembali menemui massa pengunjuk rasa di Polda DIY untuk berdialog langsung dan meredakan situasi dengan mengajak mereka mengakhiri aksi serta meminta mereka pulang dengan tertib. Sultan menghargai aspirasi pengunjuk rasa dan meminta dialog tanpa kekerasan. Sultan juga menyatakan kesediaannya menjadi penghubung untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat (CNN Indonesia, 2025).

Artikel ini sekadar memberikan pemahaman tentang pengelolaan keberagaman di wilayah Yogyakarta sebagai daerah relatif otonom dalam payung sosial-budaya Kesultanan Yogyakarta. Walaupun Yogyakarta juga mempunyai sejarah yang tidak terhindar dari konflik kekerasan,¹ peristiwa-peristiwa tersebut memberikan ruang pemahaman untuk dapat mengelola gesekan-gesekan dalam koridor keharmonisan (de Jong dan Twikromo, 2017). Gesekan-gesekan etnoreligius relatif dapat terkelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Penggalan berbagai peristiwa tersebut memberikan pijakan dalam memahami pengelolaan keberagaman di Yogyakarta; yaitu: pertama, bagaimana suatu wilayah relatif dapat mengelola keberagaman; kedua, bagaimana kelompok-kelompok heterogen dapat berinteraksi dalam fleksibilitas identitas mereka.

Keberagaman sering kali berujung pada eksploitasi, diskriminasi, marginalisasi, dan konflik. Hubungan etnis, kelas, dan agama di Indonesia sering dipandang sebagai sumber potensial terjadinya konflik dan kekerasan. Dalam konteks tersebut, analisis mendalam mengenai isu kemajemukan dan keberagaman menjadi relevan serta krusial agar dapat memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi dalam pengutamaan koridor musyawarah dan mufakat. Hubungan historis antarkelompok heterogen serta peran elite lokal dalam menghadapi heterogenitas sosial-budaya merupakan perpaduan analisis dalam kajian ini. Perpaduan analisis tersebut dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan terperinci mengenai kondisi koeksistensi dan keberlanjutan kontemporer yang berkaitan dengan keberagaman, serta isu-isu eksploitasi, diskriminasi, marginalisasi, dan konflik. Interaksi historis antara elite lokal dan kelompok heterogen di Yogyakarta merupakan bagian dari proses transformasi sosial dalam beberapa dekade terakhir. Dengan demikian, kajian ini juga menyoroti ruang sosial-budaya masyarakat di wilayah tersebut

dalam konteks masa kini dan historis, serta interaksi antara kekuasaan dan penghormatan yang dihadapi oleh berbagai kelompok sosial-budaya di Yogyakarta. Wacana para aktor yang relevan di wilayah kehidupan heterogen dalam payung sosial-budaya Kesultanan Yogyakarta juga mendapat ruang kajian. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kondisi sosial-budaya telah mendorong pengelolaan keberagaman menuju tatanan kemajemukan sosial-budaya yang lebih luas.

Konstruksi sosial-budaya kontemporer sering kali didasarkan pada peristiwa masa lalu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap isu dan pengalaman masa lalu tentang keberagaman menjadi hal yang relatif penting. Masyarakat yang terbiasa hidup bersama dengan orang lain atau *liyane* cenderung memiliki wacana sosial-budaya yang berbeda mengenai makna kebersamaan dalam keberagaman dibandingkan masyarakat yang terbiasa hidup dalam satu kesatuan kelompok yang relatif homogen. Penerimaan dan penolakan akan selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai ruang bagi proses negosiasi, kontestasi, pengakuan, dan pemahaman antara satu dengan yang lain. Proses transformasi sosial terus berlangsung dan telah membentuk wacana yang relatif berbeda mengenai keberagaman dalam beberapa dekade terakhir. Penting pula untuk memahami peran elite dalam proses tersebut karena para elite memiliki kekuatan untuk mengelola, menghargai, menerima, dan bahkan memanipulasi keberadaan berbagai kelompok sosial-budaya di wilayah tertentu. Yogyakarta merupakan salah satu contoh kasus ketika wilayah ini diperintah secara tidak langsung oleh pemerintahan kolonial Belanda selama masa kolonial, dan setelah kemerdekaan Indonesia menjadi wilayah otonom dalam rangkaian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara tradisional, wilayah Kesultanan Yogyakarta terbagi menjadi tiga bagian dalam penyediaan lingkungan multietnik, yaitu: (1) lingkungan bagi para abdi dalem, para pangeran, dan para bangsawan pemegang kekuasaan; (2) lingkungan bagi orang lain, seperti penjajah, pedagang, utusan, pengunjung, dan warga non-Jawa; serta (3) lingkungan bagi kelompok pekerja (Sullivan, 1992). Selama beberapa abad, masyarakat di wilayah ini telah hidup berdampingan dengan berbagai kelompok sosial-budaya lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Keberagaman di Yogyakarta

Secara nasional, Bhinneka Tunggal Ika berjalan paralel dengan keberagaman dalam konteks lokal Yogyakarta. Oleh karena itu, proses keberagaman di Yogyakarta perlu dipahami secara lebih saksama agar dapat memberi kontribusi pada pengelolaan keberagaman dalam skala yang lebih luas. Banyak simbol publik ke-Indonesia-an sendiri berasal dari Jawa. Warna merah putih pada bendera nasional, rumusan nasional – Bhinneka Tunggal Ika – dan burung garuda pada lambang negara, semuanya dapat ditelusuri kembali dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad ke-14, yang wilayahnya diklaim secara kasar sebagai warisan Republik Indonesia modern. Sebagaimana Suharto mencoba menggunakan wayang dan Semar untuk menyoroti demokrasi dalam hierarki ideologi suatu rezim, demikian pula hubungan dengan mitos dan sejarah ini menggambarkan

bagaimana “Javanisme Tinggi” – budaya elite Jawa yang diidealkan dan diwujudkan menjadi sesuatu yang luhur dan mendalam – telah menjadi sumber simbol identitas nasional (Hooker, 1999).

Yogyakarta merupakan wilayah yang khas di Indonesia dengan perpaduan kehidupan antara keberadaan keraton, kantor-kantor pemerintahan, toko-toko milik berbagai etnis (Tionghoa, India, dan Indonesia), tempat-tempat ibadah umat Islam maupun Kristen, perpaduan kehidupan publik yang dijalankan dalam bahasa Jawa (bahasa lokal) maupun bahasa Indonesia dalam konteks tertentu, pusat administrasi, Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, serta Pusat Budaya Jawa. Seperti halnya kota-kota besar lainnya, Yogyakarta saat ini merupakan hasil dari perebutan kekuasaan yang terjadi selama berabad-abad. Pada abad ke-16, wilayah ini dipimpin oleh Panembahan Senapati sebagai penguasa atas wilayah luas yang disebut Mataram Islam. Para penerusnya memperkuat kerajaan dengan memindahkan keraton ke Kartasura, kemudian ke Surakarta. Pada pertengahan abad ke-18, Mataram memainkan peran sentral dalam perebutan kekuasaan di Jawa.

Dalam perebutan kekuasaan antara para pangeran Jawa tersebut, VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie - Perusahaan Hindia Timur Belanda) ikut campur dengan menggunakan strategi diplomatik *adu domba (divide et impera)*. Paku Buwono III (Raja Kedua Kasunanan Surakarta) yang memerintah dari tahun 1749 hingga 1788, akhirnya menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian tersebut membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan dan Kesultanan. Wilayah di sebelah Timur Sungai Opak menjadi wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Paku Buwono III, sedangkan wilayah di sebelah Barat Sungai Opak menjadi wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta) yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta setelah Perjanjian Giyanti dan mengambil gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I (HB I). Pada 9 Oktober 1755, Pangeran Mangkubumi memerintahkan pembangunan istana di wilayah Pacethokan, yang terletak di tengah Hutan Beringan dalam koridor wilayah Barat-Timur relatif sempit, yaitu antara Sungai Winongo dan Sungai Code. Istana Kesultanan Yogyakarta tersebut terletak di pusat wilayah yang sekarang berkembang menjadi Kota Yogyakarta. Pada hari Kamis, 7 Oktober 1756 M atau Kamis Pahing, 13 Sura 1682 menurut penanggalan Jawa, Sri Sultan HB I beserta keluarga dan pengikutnya secara resmi pindah dari Pesanggrahan Ambarketawang ke Keraton Yogyakarta yang baru saja selesai dibangun. Hari dan tanggal tersebut menandai berdirinya Kota Yogyakarta kontemporer.

VOC berusaha mengendalikan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta sejak Sri Sultan HB I naik takhta. Pengendalian tersebut dilakukan melalui berbagai ketentuan yang diatur melalui serangkaian perjanjian dan intrik politik untuk melemahkan kedaulatan keraton. Setelah VOC gulung tikar pada 31 Desember 1799, bentuk pengendalian semacam itu terus berlanjut dan diteruskan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap keturunan Sultan Hamengku Buwono. Meskipun demikian, status independen Kesultanan Yogyakarta masih relatif memberikan ruang bagi keturunan Sultan Hamengku Buwono untuk memainkan peran sentral dalam pemerintahan

wilayah Yogyakarta. Status independen tersebut tetap bertahan dalam batas-batas tertentu hingga masa kemerdekaan dengan sebutan daerah istimewa, dalam koridor provinsi otonom sebagai bagian tak terpisahkan dengan NKRI. Saat ini, Yogyakarta diperintah oleh Sultan HB X yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wilayah sekitar Keraton Yogyakarta menjadi berkembang pesat sejak berdirinya keraton. Meskipun demikian, wilayah tersebut tetap menjadi pusat kehidupan tradisional masyarakat Yogyakarta dan masih memancarkan nilai-nilai budaya Jawa yang lekat dengan pengutamaan kehalusan dan keluhuran kehidupan. Dengan kata lain, meskipun wilayah itu relatif terikat dengan filosofi Jawa, namun wilayah tersebut telah berubah menjadi wilayah modern dengan populasi yang cukup padat. Masyarakat Yogyakarta dikenal memiliki karakter yang halus, sopan, dan luhur, sehingga kehidupan sosialnya cenderung lebih mengedepankan harmoni daripada konflik. Menurut Susanto (2008), beberapa aliran Islam di Yogyakarta menyerap beberapa bagian yang dianggap paling baik dari sumber budaya Jawa. Dalam konteks ini, kehidupan mereka relatif terkoneksi dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta secara umum, sekaligus dengan istana kesultanan sebagai pusat kehidupan budaya. Keluhuran kehidupan masyarakat yang khas menciptakan nuansa sosial-budaya yang berbeda dan menarik bagi banyak orang di seluruh negeri. Sebagian besar orang datang ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan maupun bekerja, sehingga kota ini menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok etnis dan berkembang sebagai mikrokosmos Nusantara.

Yogyakarta juga melahirkan organisasi keagamaan sebagai gerakan pembaruan di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Organisasi tersebut didirikan pada tahun 1912 untuk melayani umat Islam yang kebingungan dalam menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda (Reid, 2011). Secara bertahap, Muhammadiyah mengembangkan sistem pendidikan sekolah modernnya sendiri dengan hampir seribu cabang yang tersebar di sebagian besar wilayah Nusantara pada tahun 1930-an. Yogyakarta juga menjadi tempat berdirinya Taman Siswa pada tahun 1920-an, yang menjadi cikal bakal sekolah swasta modern dengan lebih dari sebelas ribu peserta magang (Ricklefs, 2007). Dua universitas paling berpengaruh di Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, masing-masing didirikan pada tahun 1949 dan 1945. Pada periode selanjutnya, sejumlah besar lembaga pendidikan pun berdiri, sehingga wilayah ini menawarkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, secara luas diyakini bahwa banyak lembaga pendidikan di Yogyakarta menyediakan pendidikan berkualitas, baik bagi calon siswa maupun calon mahasiswa yang datang dari seluruh Indonesia. Namun demikian, suku Jawa tidak menjadi minoritas di wilayahnya sendiri, karena nuansa budaya Jawa masih relatif dominan di daerah ini. Dalam konteks ini, Yogyakarta mencerminkan karakter Jawa, tetapi pada saat yang sama juga merupakan peleburan berbagai kelompok etnis Indonesia.

B. Ragam Etnis² dalam Satu Wilayah

Istana megah Sri Sultan HB X di Yogyakarta terletak di jantung wilayah Yogyakarta. Istana tersebut pada awalnya merupakan pusat kota kecil yang dikelilingi tembok. Bangunan ini bukan sekadar kompleks yang terdiri atas gedung, halaman, dan taman indah yang luas, tetapi juga berfungsi sebagai kediaman raja beserta para kerabat kerajaan. Sultan dan para kerabat kerajaan memainkan peran penting dalam evolusi organisasi dan klasifikasi peta sosial-budaya Yogyakarta.

Sejak istana keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1756, pemerintahan Sultan telah mengundang banyak orang dari dekat maupun jauh untuk bergabung sebagai aparatur kesultanan, seperti para administrator, prajurit, pekerja terampil, dan sebagainya. Sejak awal pemerintahan, Sri Sultan Hamengku Buwono dan para pejabat istana telah menata dan mengelola arus masuk para aparatur kesultanan dengan menempatkan mereka di unit-unit hunian atau kampung tertentu. Mereka ditentukan berdasarkan kelas, keterampilan, atau etnis. Secara umum, penataan kelompok-kelompok yang berbeda ini sesuai dengan tatanan sebagian besar kota di Jawa masa itu pada umumnya, seperti lingkungan tempat tinggal bagi para pangeran, bangsawan, dan pemegang kekuasaan; beberapa permukiman “warga asing”, seperti para penjajah, pedagang, misionaris, pengunjung, warga non-Jawa, dan beberapa permukiman berbagai kelompok pekerjaan (Sullivan, 1992).

Penataan fisik penduduk secara umum mengikuti tata letak kota secara simbolis dan religius.³ Sejalan dengan arsitektur Jawa, Keraton Yogyakarta dibangun berdasarkan prinsip Catur Gatra Tunggal atau empat unsur dalam satu kesatuan yang utuh. Setiap unsur atau dimensi memiliki fungsi sebagai pusat kekuasaan, pusat peribadatan, pusat kegiatan sosial, dan pusat kegiatan ekonomi. Catur Gatra Tunggal merupakan konsep penataan kota dalam kerajaan Jawa masa lalu yang bernuansa keseimbangan. Tata kelola semacam ini merupakan warisan kebijaksanaan para leluhur bangsa dalam mengelola kehidupan dengan mengedepankan relasi selaras (Twikromo, 2021).

Penataan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dalam kesatuan kampung pada masa awal Kesultanan Yogyakarta tanpa disadari telah menjadi ruang persemaian bagi pengelolaan kehidupan dalam keberagaman. Kelompok-kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelompok yang tinggal di dalam wilayah keraton bertembok (*njeron beteng* atau dalam benteng) dan kelompok yang tinggal di luar kota kecil bertembok (*njaban beteng* atau luar benteng). Kelompok masyarakat yang tinggal di dalam tembok tersebut terdiri dari tiga kategori, yaitu bangsawan (*bendara*), abdi dalem, dan rakyat biasa (*kawula dalem*).

Para bangsawan adalah orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan Sultan, termasuk keluarganya. Di bawah naungan Sultan, mereka memegang posisi yang kuat dan politis serta menjalankan peran-peran khusus dalam ritual kesultanan. Para bangsawan biasa membangun istana kecil mereka sendiri di dalam benteng. Permukiman kecil atau kampung yang terbentuk di sekitar simbol-simbol arsitektur dan status kerajaan tersebut umumnya mengadopsi nama para bangsawan tersebut.⁴

Para abdi dalem yang menjalankan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari dan ritual keluarga kerajaan juga bermukim di berbagai permukiman, seperti Kampung Patehan untuk para abdi dalem yang menyajikan teh; Kampung Siliran untuk para abdi dalem yang menyalakan dan mematikan lampu; Kampung Gamelan untuk para abdi dalem yang memainkan alat musik Jawa klasik; Kampung Kemitbumen untuk para abdi dalem yang membersihkan istana; Kampung Bludiran untuk para abdi dalem yang membuat sulaman; dan seterusnya (lihat juga Subhan, 2007 dan Zudianto, 2008). Bahkan beberapa abdi dalem juga ditugaskan di lingkungan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, permukiman di dalam benteng istana merupakan cerminan dari tempat tinggal kerabat Sultan dan para abdi dalem yang terkait dengan kegiatan sehari-hari, keagamaan, dan ritual keluarga kerajaan.

Sultan HB I mendeklarasikan Islam sebagai agama Kesultanan. Masjid Agung diresmikan tepat di utara tembok istana, enam belas tahun setelah berdirinya istana kesultanan. Di sekitar Masjid Agung, Kampung Kauman hadir sebagai sebuah kawasan yang berkembang dan menampung para ulama istana. Kelompok ulama ini terdiri dari sekelompok besar orang Arab yang diundang oleh Sultan untuk mengajarkan agama Islam kepada kerabat istana. Islam, dengan keyakinan dan ritualnya sendiri, dipraktikkan secara berdampingan dengan kepercayaan dan ritual lokal. Namun demikian, perlu dipahami bahwa para ulama istana tersebut juga menjadi pelopor dan mengorganisir gerakan pemurnian Islam dari kepercayaan lokal pada tahun 1912. Sejak saat itu, Yogyakarta -atau lebih tepatnya Kampung Kauman- menjadi pusat pemurnian Islam di Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Muhammadiyah.

Kelompok masyarakat yang tinggal di luar tembok istana relatif lebih beragam, yaitu kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok etnis maupun kelompok pekerjaan dari Jawa maupun non-Jawa. Selain itu, beberapa pangeran juga mendirikan tempat tinggal ataupun permukiman yang dinamai menurut nama mereka di sekitar istana.⁵ Berbagai kesatuan keprajuritan ditempatkan di barak-barak di sisi bagian Selatan, Timur, dan Barat istana (Sabdacarakatama, 2009). Permukiman tempat tinggal berbagai kesatuan prajurit tersebut dinamai sesuai nama komandan atau divisi mereka.⁶ Selain kesatuan prajurit Jawa, kesatuan prajurit Kesultanan Yogyakarta juga terdapat kesatuan prajurit non-Jawa, yaitu kesatuan prajurit Bugis dan Daeng sebagai kesatuan prajurit keturunan dari Sulawesi Selatan. Para leluhur mereka pernah membantu dalam perang untuk merebut kembali Keraton Mataram yang dikuasai oleh Pangeran Trunajaya dari Madura pada masa pemerintahan Amangkurat I pada tahun 1670-1679, sehingga kesatuan prajurit tersebut bergabung dengan pasukan Mataram setelah perang usai⁷ (lihat Marihandono dan Juwono, 2008). Pada tahun 1755, Perjanjian Giyanti juga mengatur pembagian para abdi dalem serta kesatuan prajurit. Kesatuan prajurit Bugis dan Daeng menjadi bagian dari kesatuan prajurit Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan prajurit Bugis dan Daeng justru memberikan bukti bahwa kelompok etnis lain -tidak hanya Jawa- juga menjadi bagian dari Kesultanan Yogyakarta pada tahap awal dan bahkan memainkan peran penting di dalamnya.

Di seberang pintu masuk bagian Utara keraton, di sebelah Timur garis sumbu imajiner antara Gunung Merapi dan Samudra Hindia, Belanda membangun sebuah benteng antara tahun 1776 dan 1778, atau hanya selisih dua tahun setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Benteng tersebut diberi nama Vredenburg dan memiliki lokasi yang strategis untuk mengendalikan kekuasaan Sultan sekaligus memberi peringatan pada Sultan atas keberadaan kekuatan pasukan Belanda. Mereka menempatkan sebuah meriam yang diarahkan ke keraton dalam posisi siap tembak, sehingga semakin menegaskan keberadaan pasukan Belanda. Wilayah di sekitar benteng kemudian menjadi wilayah pemukiman bagi orang Belanda dan juga orang Eropa lainnya. Sekitar setengah abad kemudian, pada tahun 1832, pemerintah kolonial Belanda menyelesaikan pembangunan Gedung Agung sebagai kediaman resmi residen yang terletak di sebelah barat Benteng Vredenburg.

Sedikit ke arah Utara terdapat Pasar Beringharjo yang menjadi pusat kegiatan ekonomi sejak awal, sekaligus melambangkan elemen ekonomi kesultanan. Kelompok Tionghoa juga hadir di sekitar area pasar dan berkembang di sepanjang Jalan Malioboro. Mereka mengubah Jalan Malioboro menjadi kanal bisnis kota.⁸ Berbagai pengrajin ditempatkan di beberapa lingkungan khusus sebelah Utara istana, termasuk penjahit, tukang kayu, tukang batu, tukang bangunan, jaksa, dan para utusan.⁹ Dewasa ini, banyak nama kampung yang merujuk pada profesi-profesi tersebut telah melebur menjadi kampung masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Pengalokasian orang-orang dengan ciri-ciri serupa ke berbagai permukiman sekitar keraton dimulai dari ujung utara Jalan Malioboro. Seiring dengan meningkatnya arus kedatangan “orang luar” ke wilayah Yogyakarta, berbagai permukiman baru pun bermunculan, seperti Kampung Menduran yang awalnya merupakan kampung orang Madura dan Kampung Sayidan yang pada awalnya sebagai kampung orang Arab. Pada abad ke-20, wilayah Yogyakarta telah berkembang menjadi kota yang dihuni oleh beragam kelompok etnis yang berasal dari Jawa, berbagai pulau lain di Indonesia, serta mancanegara. Beberapa kantong kecil Tionghoa dapat ditemukan di seluruh penjuru kota, yang umumnya berhubungan dengan pusat-pusat ekonomi dan pasar di wilayah Yogyakarta.

Berbagai permukiman Belanda (seperti Kidul Loji, Kota Baru, dan Sagan) didirikan di sisi Utara keraton (Subkhan, 2007 dan Sabdacarakatama, 2009). Jumlah orang Belanda yang tinggal di Yogyakarta meningkat seiring dengan pertumbuhan industri gula, perkebunan, dan meningkatnya minat untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan Kota Yogyakarta telah berubah menjadi kota khas Jawa¹⁰. Perkembangan tersebut kurang lebih mengikuti klasifikasi yang diberikan oleh Sullivan (1992), yaitu istana dengan para bangsawan, abdi dalem Jawa, dan pengrajin di pusatnya. Permukiman orang Belanda, Tionghoa, Arab, kelompok etnis non-Jawa lainnya, dan berbagai permukiman kelompok jenis pekerjaan berada di sekelilingnya.

C. Hidup dalam Konstruksi Keberagaman

Pada bagian ini akan ditunjukkan bahwa beberapa perkembangan awal telah meletakkan fondasi bagi terbentuknya ruang lingkup keberagaman, serta yang lebih penting adalah tumbuhnya penerimaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Peletakan fondasi tersebut diinisiasi oleh para Sultan sesuai dengan kelompok dan keberadaan mereka masing-masing. Sejak berdirinya Keraton Yogyakarta, Sultan *mengorkestrai* pembangunan unit-unit pemukiman dengan menyatukan orang-orang berdasarkan fungsi dan/atau kelas yang serupa, atau mereka yang berasal dari latar belakang sosial-budaya yang sejenis di dalam wilayah kesultanan. Dengan kata lain, berbagai kelompok yang berbeda tersebut ditempatkan di satu lingkungan atau kampung, kemudian bersatu dalam ikatan kekuasaan politik dan ekonomi di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Dalam konteks ini, berbagai kelompok tersebut memperoleh perlindungan dari Sultan, termasuk ruang dan tempat yang mereka butuhkan untuk mengekspresikan identitas sosial-budaya masing-masing.

Setiap kelompok sosial-budaya tidak hanya memperoleh ruang gerak yang diperlukan dalam mempraktikkan ritual dan agama yang berkaitan dengan identitas sosial mereka, tetapi juga dalam mengartikulasikan identitas tersebut pada saat-saat tertentu, terutama ketika berinteraksi dengan pihak lain yang berbeda. Konflik kekerasan antar kelompok hampir tidak pernah terjadi di bawah kendali dan payung sosial-budaya Sultan. Dengan sedikit kehati-hatian, dapat dikatakan bahwa kehidupan sehari-hari merupakan wahana nyata bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan serta berinteraksi dengan orang lain dari berbagai kelompok maupun kelas masyarakat. Model semacam ini membentuk dasar bagi toleransi masa kini dalam kemajemukan dan keberagaman sosial-budaya di Yogyakarta.

Selain model keberagaman sosial-budaya, Sultan HB I telah menekankan cita-cita keberagaman dengan menempatkan para abdi dalem keraton yang secara fisik sering kali dianggap kurang sempurna. Para *abdi dalem Palawijo* merupakan sekelompok orang cebol, albino, dan penyandang disabilitas fisik lainnya. Meskipun sering kali dianggap aneh, mereka memperoleh tempat dan perlindungan khusus dari Sultan Yogyakarta. Kehadiran *abdi dalem Palawijo* justru dipandang dapat meningkatkan wibawa Sultan.¹¹ Mereka bahkan terlibat dalam pelaksanaan berbagai upacara yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta dan tampak dekat dengan Sultan. Dalam konteks keberagaman, para *abdi dalem Palawijo* mengisyaratkan wacana tentang pengutamaan sikap dan perlakuan istimewa terhadap mereka yang berbeda, alih-alih mengucilkan mereka.

Selain kehadiran beberapa kelompok etnis yang berbeda di wilayah Kesultanan Yogyakarta, pelaksanaan upacara Garebek (*Grebeg*) Keraton Yogyakarta memberikan pemahaman lebih lanjut tentang wacana keberagaman. Seiring dengan Budaya Jawa, Keraton Yogyakarta merupakan pusat kekuasaan politik dan keagamaan, sehingga berbagai ritual serta upacara diselenggarakan hampir sepanjang tahun. Garebek Kasultanan Yogyakarta diselenggarakan tiga kali dalam setahun dan selalu berulang setiap tahunnya. Pada setiap perayaan Garebek, suatu arak-arakan sesuai rute yang telah ditentukan oleh keraton sebagai simbol permohonan dan rasa syukur atas perlindungan

kesultanan dari kemungkinan bencana. Arak-arakan ini merupakan ungkapan welas asih (belas kasih) dan rasa terima kasih keraton kepada Sang Sumber Kehidupan maupun masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Parade Garebek yang diselenggarakan oleh Sultan pada tanggal 5 Mei 1857, diikuti oleh berbagai kelompok, seperti kerabat dan abdi dalem Sultan, pasukan prajurit kerajaan, ulama, maupun perwakilan dari kesultanan Jawa lain, seperti Surakarta. Kelompok etnis lain juga berpartisipasi dalam arak-arakan tersebut: orang Sunda dan berbagai kelompok non-Jawa, seperti orang Madura, orang Timor, orang Rote, orang Arab, orang Tionghoa, dan bahkan orang Belanda (Koning, 1857).

Parade tersebut menjadi tontonan, penghayatan, pembelajaran, dan narasi tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Hal ini menjadi bukti nyata keterbukaan Sultan terhadap keberagaman etnis. Namun, tanpa disadari, hal ini justru memperkuat konstruksi ideologi tentang apresiasi keberagaman di kalangan masyarakat Yogyakarta yang menyaksikan arak-arakan tersebut.



Gambar 1. Parade *Garebek* Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1857
Sumber: Koning, 1857 dan Twikromo, 2018: 20-21

Keraton Yogyakarta, sebagai salah satu pusat kekuasaan Jawa, mencerminkan kehidupan yang ideal dalam keberagaman. Dengan demikian, Kesultanan Yogyakarta membentuk cetak biru bagi para pengikutnya. Dalam konteks ini, sikap dan perilaku Sultan, termasuk cara beliau menyikapi keberagaman, menjadi acuan bagi rakyat kesultanan. Dengan kata lain, para Sultan relatif menjadi simbol keberagaman dalam tiga cara pengelolaan, yaitu: pertama, mengatur tatanan fisik kelompok-kelompok etnis selama perkembangan kesultanan; kedua, menerima identitas sosial-budaya dari berbagai kelompok yang berbeda melalui ritual yang digunakan untuk mengekspresikan identitas mereka; dan ketiga, mengintegrasikan gagasan penghargaan maupun penghormatan terhadap keberagaman dalam ritual dan realitas kehidupan. Para Sultan memainkan peran utama dalam membentuk kerangka kerja bagi pengelolaan keberagaman kontemporer di Yogyakarta, dan bahkan di Indonesia secara lebih luas.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan artikel ini, peran Sultan Yogyakarta masih sangat penting dalam mengelola keberagaman dan perbedaan kelompok etnis yang terkadang mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan berlawanan pada kehidupan kontemporer. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (HB IX), barangkali memberikan salah satu contoh paling jelas dari peran tersebut selama revolusi Indonesia dari Desember 1948 hingga Juni 1949. Pada akhirnya, upaya Sultan HB IX menghasilkan pembentukan tatanan konstitusional yang tidak biasa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih berlaku hingga saat ini setelah lebih dari 75 tahun kemudian. Dalam peristiwa penting tersebut, Sultan memenuhi peran “administrator-solidaritas-pembangun” dalam terminologi Feith (1962) dan juga menjadi ciri khas sebagian besar para Sultan leluhur beliau. Selain tidak terlepas dari kerja sama Sultan dengan administrator terkemuka, seperti Hatta, Sjahrir, dan Djuanda, keberhasilan Sultan HB IX dalam membelokkan pendudukan Belanda di Yogyakarta, juga karena posisi Sultan yang lekat dengan kekuasaan secara tradisional (Monfries, 2008). Beliau dengan cerdas memanfaatkan statusnya sebagai Sultan untuk mengabdikan kepada republik selama periode kritis tersebut. Hal tersebut penting dan bahkan dianggap esensial dalam perjuangan kemerdekaan tahun 1949. Ketika Belanda menduduki Yogyakarta pada tahun 1948, Sultan mengunci diri di keraton dan tetap tidak bisa dihubungi. Sultan menjalankan pemerintahan rahasia di balik layar, bahkan ketika Belanda mengetahuinya, mereka tidak berani melawan Sultan karena takut membangkitkan kemarahan jutaan orang Jawa yang masih menganggap beliau hampir seperti dewa. Ketika Sultan akhirnya bertemu dengan para pejabat Belanda yang dipimpin oleh Panglima Jenderal Meijer, beliau menolak tuntutan mereka dan “dengan tegas dan tepat, bahkan mungkin sepenuhnya sopan”, meminta mereka pergi dengan menyatakan “Saya tidak meminta Tuan-tuan, untuk datang ke Yogyakarta” (Anderson, 1972 dan Monfries, 2008). Dalam konteks sikap dan perilaku Raja Jawa yang tepat dan bijaksana, beliau menaklukkan musuhnya tanpa perlawanan, tanda yang paling meyakinkan dari kedudukannya yang tinggi (Monfries, 2008).

Setelah kemerdekaan, Sultan masih memperoleh posisi penting dalam Negara Republik yang baru tersebut, yaitu sebagai Menteri Negara/Koordinator Keamanan Republik Indonesia. Dalam mengatur penarikan pasukan Belanda, Sultan berhasil menjaga Yogyakarta tetap damai, meskipun Belanda memprediksi akan terjadi teror dan kekacauan setelah evakuasi (De Locomotief, 1949a dalam Monfries, 2008). Media berbahasa Belanda mengakui dengan ramah: “Kami bertanya sebelumnya, bisakah Sultan melakukannya? Sejauh ini, beliau memang bisa” (De Locomotief, 1949b dalam Monfries, 2008).

Dalam jabatan barunya sebagai Menteri Pertahanan pada 13 Juli 1949, Sultan berkeliling Jawa dan Sumatra, menghubungi para pemimpin militer untuk membahas gencatan senjata dan memperkenalkan kebijakan pemerintah (Monfries, 2008). Sebagaimana dicatat oleh Nasution (1983), bahkan kunjungan ke Sumatra berjalan tanpa insiden besar karena prestise dan penerimaan terhadap Sri Sultan HB IX tampak tinggi di semua bidang. Setelah menerima penyerahan kedaulatan secara simbolis dari Belanda pada akhir tahun, maka Sultan mengundurkan diri dari panggung politik utama untuk kembali ke keratonnya.

Sri Sultan HB IX yang sangat populer kembali ke pemerintahan pusat pada pertengahan 1960-an dan menjadi wakil presiden dalam dua periode pertama Suharto untuk membantu menyelamatkan perekonomian dan memulihkan ketertiban di Indonesia yang kacau (Foresster, 1999). Beliau menolak pengangkatan kembali pada tahun 1978, diduga karena muak dengan keserakahan Presiden Suharto yang semakin meningkat (Friend 2003). Putra beliau, Sri Sultan HB X dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendukung reformasi yang vokal dan menjadi pemain kunci dalam politik oposisi pasca-Suharto, terutama karena perannya dalam demonstrasi mahasiswa besar-besaran melawan Presiden Suharto.¹² Ketika Jakarta mengisyaratkan gelagat akan menunjuk orang luar sebagai Gubernur Yogyakarta pada tahun 1998, rakyat Yogyakarta turun ke jalan dan berhasil menuntut agar Sultan menjadi gubernur.

D. Menghargai Keberagaman

Bahkan hingga kini, Sultan tetap menjadi tokoh populer dan penting dalam mempertahankan status quo di Kota Toleransi. Ungkapan tersebut sering digunakan oleh wisatawan dalam merujuk pada keramahmatan masyarakat Yogyakarta atau dapat dikatakan terkandung sikap terbuka terhadap kemajemukan. Kehadiran sejumlah besar mahasiswa di Yogyakarta sejak awal abad ke-20 relatif memperkuat idealisme toleransi di wilayah ini. Selama lebih dari setengah abad terakhir, asrama mahasiswa yang didirikan di beberapa wilayah Yogyakarta sering kali menampung mahasiswa dari latar belakang etnis atau asal yang sama. Banyak mahasiswa lain yang tinggal di asrama bersama kerabat mereka yang telah bermigrasi ke Yogyakarta lebih dulu. Seperti pada masa-masa awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta, para mahasiswa bebas menjalankan agama mereka sendiri dan juga menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Para mahasiswa diberi ruang cukup lebar dalam mengikuti ritual budaya mereka sendiri, sambil tetap bertemu dan berinteraksi dengan “orang lain” di tempat pendidikan mereka maupun di lingkungan mereka sendiri. Perlu dipahami bahwa kehadiran beberapa asrama mahasiswa di Yogyakarta beberapa dasa warsa yang lalu tidak dapat dipisahkan dari konflik atau pertikaian antar berbagai kelompok mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa dan kelompok masyarakat di Yogyakarta. Pada periode awal kehadiran mahasiswa non-Jawa di Yogyakarta, konflik antaretnis tampak terjadi sesekali dalam skala kecil (lihat Hefner, 2007). Namun, konflik dan pertikaian tersebut relatif dapat diminimalkan atau diselesaikan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik kekerasan yang lebih besar. Bahkan, pengalaman dengan pertikaian tersebut sering dijadikan pembelajaran tentang bagaimana mengelola interaksi antarkelompok dan beradaptasi di lingkungan kehidupan Yogyakarta yang beragam secara lebih bijaksana, cerdas, dan kreatif.

Ketika jumlah mahasiswa semakin banyak, hal tersebut turut meningkatkan pertumbuhan keragaman di Yogyakarta. Perbedaan dalam etnis, latar belakang budaya, bahasa, dan agama menjadi semakin kompleks. Pada tahun 2008, Wali Kota Yogyakarta, Henry Zudianto, mencoba memberikan dorongan cita-cita keberagaman kota dengan mencanangkannya sebagai “Kota Toleransi”. Citra semacam itu diharapkan semakin mendewasakan sikap dan tindakan warga

Yogyakarta dalam menghargai perbedaan. Dengan kata lain, masyarakat akan mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan tindakan yang dapat merusak citra tersebut. Tantangan terhadap tergerus atau runtuhnya semangat toleransi serta praktik penghargaan terhadap keberagaman suku dan agama menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat di wilayah Yogyakarta.

Beberapa tahun terakhir ketika muncul tindakan intoleransi di “Kota Toleransi” telah mendorong sejumlah masyarakat untuk berkumpul dan merayakan keberagaman dan toleransi, bahkan unggahan teks di media sosial dalam menegakkan toleransi juga bermunculan. Pertemuan dan unggahan semacam ini menunjukkan rasa toleransi yang mengakar terhadap keberagaman. Pardo (2009) telah mengingatkan bahwa toleransi terhadap keberagaman mengandung sikap dan perilaku untuk menghormati dari sudut pandang dan keyakinan orang lain dan seharusnya merupakan proses dua arah. Dalam konteks tersebut, toleransi lebih pada sikap menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, atau kebiasaan orang lain tanpa memaksakan kehendak sendiri dan toleransi bukan sekedar sikap menghargai dan menghormati perbedaan pandangan, keyakinan, dan kebiasaan orang lain, karena hal tersebut berbeda atau bahkan bertentangan dengan diri sendiri. Meskipun Yogyakarta mungkin tampak sebagai contoh yang tepat untuk memahami semangat dan praktik toleransi terhadap keberagaman etnis, kota ini bukannya tanpa tantangan untuk mengorkestrai populasi etnisnya yang beragam menuju masa depan yang harmonis dan bebas dari konflik atau kekerasan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perkembangan historis kondisi sosial-budaya di kota Yogyakarta. Perkembangan historis tersebut telah mendorong pengelolaan keberagaman menuju kemajemukan sosial-budaya yang lebih luas. Konstruksi sosial-budaya kontemporer sering kali didasarkan pada peristiwa masa lalu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam konteks ini, pemahaman isu dan pengalaman keberagaman di masa lalu menjadi sangat penting dan esensial. Pengelolaan keberagaman dari atas, yang didorong oleh pemerintah kolonial Belanda dan Negara Indonesia, serta pengelolaan keberagaman dari bawah melalui peran dominan garis keturunan lokal para Sultan Yogyakarta dan kerabatnya, menjadi perjumpaan yang esensial dalam pengelolaan keberagaman. Yogyakarta merupakan contoh kasus yang menarik karena sejak dulu hingga kini wilayah ini cukup otonom dan memiliki sejarah konflik kekerasan yang relatif kecil. Pengelolaan keberagaman dari atas pada masa kolonial dan pasca-kolonial di Yogyakarta relatif mirip dengan sebagian besar kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan tentang mengapa Yogyakarta relatif menjadi “Kota Toleransi” sebaiknya ditempatkan dalam konteks historis dinamika pemerintahan pra- dan pasca-kemerdekaan.

Status otonomi memberikan ruang gerak bagi Sultan dan pemerintahan lokal untuk menegaskan kekuatan tandingan terhadap pengelolaan keberagaman dari bawah. Pemahaman

ini merupakan faktor terpenting yang menjelaskan nilai positif Yogyakarta bagi keberagaman etnis. Hal tersebut dimulai sejak masa-masa awal perkembangan wilayah, ketika wilayah tersebut secara resmi masih di bawah kendali Belanda. Dalam beberapa hal, wilayah ini sesuai dengan ciri khas kota-kota Jawa yang diciptakan Belanda, tetapi pada aspek lain terdapat perbedaan yang mencolok. Setiap kelompok sosial-budaya memperoleh ruang gerak yang diperlukan untuk mempraktikkan ritual dan agama yang berkaitan dengan identitas sosial mereka, sekaligus untuk mengartikulasikan identitas tersebut pada momen-momen tertentu ketika berinteraksi dengan pihak lain yang berbeda. Konflik-konflik kekerasan antarkelompok yang berbeda relatif hampir tidak pernah terjadi di bawah kendali sosial-budaya Sultan. Bahkan, dengan sedikit kehati-hatian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran kehidupan sehari-hari mengisyaratkan bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan serta berinteraksi dengan “orang lain yang berbeda” dari berbagai kelompok atau kelas masyarakat. Dengan demikian, model semacam ini dapat membentuk landasan relatif kokoh bagi wacana toleransi terhadap diferensiasi sosial-budaya di Yogyakarta saat ini.

Selain itu, sikap dan perilaku Sultan, termasuk cara beliau menangani keberagaman dapat menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat di wilayah Yogyakarta, bahkan dalam jangkauan lebih luas. Dengan kata lain, para Sultan dapat menjadi simbol keberagaman melalui perpaduan peran tradisional Sultan dengan perkembangan kehidupan maupun pengintegrasian gagasan penghargaan maupun penghormatan terhadap keberagaman dalam ritual serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para Sultan memainkan peran utama dalam membentuk kerangka kerja kontemporer bagi keberagaman di Yogyakarta. Dalam dinamika kehidupan kontemporer, Sri Sultan Hamengkubuwono X, yang bertakhta sejak tahun 1989 telah menunjukkan peran penting dalam beberapa keadaan yang krusial. Ketika sekitar satu juta orang berkumpul di Alun Alun Utara pada 20 Mei 1998, Sultan Kesultanan Yogyakarta hadir di tengah kerumunan massa yang sedang unjuk rasa dan berhasil menenangkan mereka. Bagi banyak mahasiswa saat itu, tindakan Sri Sultan HB X jelas berkontribusi positif terhadap suasana keterbukaan. Sri Sultan HB X kembali menemui massa pengunjuk rasa di Polda DIY pada Sabtu dini hari, tanggal 30 Agustus 2025, untuk berdialog langsung dan meredakan situasi.

Singkatnya, pengelolaan keberagaman dari bawah menciptakan identitas khas terdiri dari perpaduan identitas khusus dan identitas umum. Kombinasi khas ini muncul secara relatif seimbang di Yogyakarta, di mana keduanya tidak benar-benar terancam oleh yang lain, dan status quo jelas diakui oleh sebagian besar pihak, sehingga tidak menimbulkan konflik. Model keberagaman di Yogyakarta dihasilkan dari kombinasi pengelolaan dari atas dan bawah maupun melalui identitas umum dan khusus yang hadir secara relatif seimbang. Di bawah payung sosial-budaya Kesultanan Yogyakarta, para Sultan, para kerabat, dan para pendukungnya memainkan peran utama dalam mengelola keberagaman menuju kemajemukan sosial-budaya yang lebih luas dalam hubungan saling mengelola dan menyeimbangkan di lingkungan masyarakat yang beragam. Dalam konteks semacam ini perwujudan keharmonisan kehidupan bersama dapat berproses seiring dengan perkembangan kehidupan.

B. Saran

Ketika Yogyakarta menjadi contoh kasus dalam proses perwujudan keharmonisan kehidupan bersama seiring dengan perkembangan kehidupan, maka pengelolaan keberagaman menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat wilayah DIY. Wilayah Yogyakarta telah menghadirkan perjumpaan berbagai kelompok etnis dan menjadi sebuah mikrokosmos nusantara, sehingga pengelolaan keberagaman tersebut dapat diperluas sebagai tugas dan tanggung jawab seluruh warga NKRI. Pengelolaan keberagaman dari atas maupun dari bawah perlu diberikan ruang perjumpaan secara padu serasi. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan di Indonesia, sehingga perlu diberikan ruang perjumpaan harmonis secara berkelanjutan dalam perkembangan kehidupan yang semakin beragam dewasa ini. Karakter harmonis bangsa menjadi pijakan dalam pengelolaan keberagaman, sebagaimana telah diwariskan oleh para leluhur Sultan Kesultanan Yogyakarta dan para leluhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B. R. O'G. (1972). The idea of power in Javanese culture. Dalam Claire Holt, Benedict R.O'G. Anderson, dan James Siegel (Ed.), *Culture and politics in Indonesia*. London: Cornell University Press, halaman 1-69.
- CNN Indonesia. (2025). *Sultan HB X datangi markas polda DIY di tengah aksi massa*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250829233800-20-1268121/sultan-hb-x-datangi-markas-polda-diy-di-tengah-aksi-massa> (Diakses 25 September 2025).
- Cribb, R. (2010). *Digital atlas of Indonesian history*. Copenhagen: NIAS Press.
- Emmerson, D. K. (1999). Exit and aftermath: The crisis of 1997-98. Dalam D.K. Emmerson (Ed.), *Indonesia beyond Suharto: Polity, economy, society, transition*. New York, London: M.E. Sharpe & Asia Society, halaman 295-343.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Foresster, G. (Ed.). (1999). *Post-Suharto Indonesia: Renewal or chaos*. Leiden/Singapore: KITLV Press/Institute of Southeast Asian Studies.
- Friend, T. (2003). *Indonesian destinies*. Cambridge, Massachusetts, dan London: Belknap Press of Harvard University Press.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2007). *Politik multikulturalisme: Menggugat realitas kebangsaan* (terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.
- Hooker, W. M. (1999). Expression: Creativity despite constraint. Dalam D.K. Emmerson (Ed.), *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*. New York, London: M.E. Sharpe & Asia Society, halaman 262-294.
- de Jong, E. dan Twikromo, Y. (2017). Friction within harmony: Everyday dynamics and the negotiation of diversity in Yogyakarta, Indonesia. Dalam *Journal of Southeast Asian Studies* (JSEAS-The National University of Singapore) Vol. 48 No. 1, Februari 2017.

Halaman 71-90.

- Koning, Z.M. Den. (1857). *Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Delftsche studenten-corps den 5den Mei 1857, Voorstellende den Garebek optogt van den Sultan van Djokjokarta en de meest karakteristieke typen uit den Nederlansch-Indischen Archipel*. 's Gravenhage: E. Spanier.
- Marihandono, dan Juwono. (2008). *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela tradisi dan kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Banjar Aji Production.
- Monfries, J. (2008). The sultan and the revolution. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* (BKI), 164 (2/3), halaman 269-297.
- Nasution, A. H. (1983). *Memenuhi panggilan tugas (jilid 2): Kenangan masa gerilya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pardo, I. (2009). Dynamics of exclusion and integration: A sobering view from Italy. Dalam Giuliana B. Prato (Ed.), *Beyond multiculturalism: Views from anthropology*. Farnham/ Burlington: Ashgate publishers, halaman 103-122.
- Reid, A. (2011). *To nation by revolution: Indonesia in the 20th century*. Singapore: NUS Press.
- Ricklefs, M. (2007). *Sejarah modern Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Roseman, C.C., H.D. Laux, dan G. Thieme (Ed.). (1996). *Ethnicity: Geographic perspectives on ethnic change in modern cities*. Lanham/Maryland: Rowman and Littlefield.
- Sabdacarakatama, K. (2009). *Sejarah keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Narasi.
- Siegel, J. T. (2000). *Penjahat gaya (orde) baru: Eksplorasi politik dan kriminalitas*. Yogyakarta: LKiS.
- Subkhan, I. (2007). *Hiruk pikuk wacana pluralisme di Yogya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sullivan. (1992). *Local government and community in Java: An urban case-study*. Singapore: Oxford University Press.
- Susanto, A. A. (2008). *Under the umbrella of the sultan: Accommodation of the Chinese in Yogyakarta during Indonesia's new order*. PhD thesis Radboud University Nijmegen.
- Twikromo, Y. A. (2025). *Ratu kidul*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Twikromo, Y. (2021). *Mewujudkan keharmonisan kehidupan di bumi nusantara*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.
- Twikromo, Y. (2018). Rajutan kehidupan bersama di Yogyakarta: Koridor harmoni dalam bingkai keistimewaan. Dalam Sindung Tjahyadi (Ed.), *Bunga rampai budaya*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, halaman 17-47.
- Zudianto, H. (2008). *Kekuasaan sebagai wakaf politik: Manajemen Yogyakarta kota multikultur*. Yogyakarta: Kanisius.

1 Yogyakarta tidak dapat mencegah beberapa konflik nasional, seperti pembantaian komunis dan terduga komunis pada tahun 1965-66 maupun pembunuhan preman (gali) pada tahun 1983 dan 1984 (lihat Siegel, 2000), termasuk

peristiwa penyerbuan oleh sekelompok anggota Kopassus ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman pada tanggal 23 Maret 2013.

2 Roseman, Laux, dan Thieme (1996) yang memperkenalkan istilah ini untuk merujuk pada keragaman etnis di perkotaan sebagai konsekuensi dari restrukturisasi politik dan ekonomi yang telah meningkatkan dan mendiversifikasi mobilitas tenaga kerja dan modal.

3 Keraton dibangun pada poros suci yang membentang dari Gunung Merapi di Utara hingga Samudra Hindia di Selatan. Gunung Merapi merupakan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan memiliki simbolisme kosmologis yang signifikan karena diyakini sebagai tempat tinggal bagi arwah leluhur yang meninggal sebagai orang saleh. Samudra Hindia dipercaya sebagai tempat tinggal Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Laut Selatan. Dengan demikian, keberadaan Keraton Gunung Merapi, Kesultanan Yogyakarta, dan Keraton Laut Selatan dipercaya sebagai keraton yang saling menjaga dan melindungi agar keseimbangan dunia dapat terkelola dengan baik (lihat, Twikromo, 2025).

4 Beberapa nama perkampungan di dalam benteng keraton masih mengingatkan pada unit pemukiman keluarga kerajaan, seperti Kampung Kadipaten sebagai tempat tinggal Adipati Anom, mantan pangeran kesultanan, Kampung Wijilan tempat tinggal Pangeran bernama Wijil, dan Kampung Panembahan sebagai tempat tinggal putra sulung Sultan HB VIII.

5 Contohnya: Pangeran Ngabehi, Pangeran Notoyudo, Pangeran Pringgokusumo, Pangeran Suryoatmaja, Pangeran Pujokusumo, Pangeran Tejokusumo, Pangeran Ngadikusumo, Pangeran Suryowijaya, Pangeran Suryodiningrat, dan sebagainya.

6 Contohnya: Kampung Kumendaman yang diberi nama sesuai jabatan komandan militer, Kampung Ketanggungan yang disesuaikan dengan nama prajurit Ketanggung di lingkungan tersebut; Kampung Patangpuluhan yang disesuaikan dengan nama prajurit Patangpuluh; Kampung Jogokaryan yang disesuaikan dengan nama prajurit Jogokaryo; Kampung Wirobrajan yang disesuaikan dengan nama prajurit Wirobrojo; Kampung Prawirotaman yang disesuaikan dengan nama prajurit Prawirotomo; Kampung Nyutran yang disesuaikan dengan nama prajurit Nyutro; dan, Kampong Surokarsan yang disesuaikan dengan nama prajurit Surokarso di lingkungan tersebut.

7 Pada tahun 1674, banyak pengungsi Bugis menetap di Madura dan di Demung, dengan izin penguasa Mataram Amangkurat I. Namun, pada tahun 1675, mereka bergabung dengan pangeran Madura Trunajaya dalam pemberontakan melawan Mataram dan mulai menyerbu pesisir Jawa. Pada tahun 1679, Trunajaya terbunuh dan banyak mantan pengungsi kembali ke Sulawesi, tetapi beberapa menuju ke barat untuk mencari tempat perlindungan baru (Cribb, 2010).

8 Menurut Marihando dan Juwono (2008: 3), Sultan HB II mengizinkan pembukaan Kampung Tionghoa lain tepat di sebelah keraton (sekarang Kampung Secodiningrat atau Kidul Loji).

9 Lihat juga Zudianto (2008).

10 Kota-kota non-Jawa seperti Buleleng di Bali Utara dan Makassar di Sulawesi Selatan juga menunjukkan berbagai kesamaan dalam perkembangan keberagaman dengan kota-kota di Jawa.

11 Menurut kepercayaan Jawa tentang kekuasaan, kedekatan Sultan dengan rakyat merupakan simbol kewibawaan dan kekuatan supranatural Sang Sultan.

12 Penobatan Sultan Hamengku Buwono dipenuhi dengan kemegahan dan upacara besar-besaran, dengan arak-arakan secara besar-besaran, yang masih melibatkan orang-orang kerdil dan albino.

